

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 DAERAH TAHUN 2016-2025

Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Azas dan Tujuan	4
1.3 Visi dan Misi Penanaman Modal	5
1.4 Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal	5
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN	8
2.1 Kondisi Geografis	8
2.2 Potensi Pengembangan Wilayah	13
2.3 Demografi	29
2.4 Pendapatan Domestik Regional Bruto	30
2.5 Potensi Unggul an Peluang Investasi	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	45
3.1 Peningkatan Iklim Penanaman Modal	45
3.2 Mendorong Persebaran Penanaman Modal yang Berdasarkan Kawasan	48
3.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi	49
3.4 Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	49
3.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)	49
3.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/ atau Insentif Penanaman Modal;	49
3.7 Promosi Penanaman Modal	51
BAB IV PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL	
4.1 Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat	52
4.2 Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;	53
4.3 Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan	53
4.3 Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	54
PENUTUP	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah terlaksana dengan baik, maka akan berdampak baik pula terhadap pembangunan nasional. Pembangunan daerah memerlukan modal yang besar. Modal tersebut bisa berasal dari Pemerintah Daerah sendiri, Pemerintah Pusat, masyarakat atau swasta. Peran masyarakat dan pihak swasta sangat diperlukan dalam pembangunan, karena baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan. Kewenangan daerah dalam melibatkan swasta dalam proses pembangunan daerah menjadi lebih mudah pada era otonomi daerah.

Era otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan segala potensi yang ada untuk membangun daerah secara mandiri sebagaimana yang tercantum dalam UU no 22 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU no 32 Tahun 2004 dan UU no 23 Tahun 2014. Selanjutnya kemandirian sangat diperlukan bagi daerah dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Salah satu permasalahan yang sangat urgen dihadapi daerah adalah masalah penanaman modal. Keterbatasan permodalan yang disediakan daerah dalam APBD, merupakan hal yang jamak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012, dimana daerah mempunyai peluang untuk bersinergi melibatkan swasta dan masyarakat dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) sesuai dengan kondisi objektifnya. Rencana umum penanaman modal daerah ditujukan untuk mencapai pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut banyak tantangan yang akan dihadapi. Tantangan tersebut antara lain adalah bagaimana mewujudkan RUPMD yang tepat dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan daerah saat ini. Karena itu semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus berkomitmen untuk menjaga suasana investasi yang kondusif sehingga berdampak terhadap peningkatan investasi dan pada akhirnya tercipta pembangunan ekonomi kerakyatan yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Selanjutnya Rencana umum penanaman daerah hendaknya digali dari kondisi riil yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat di daerah. Potensi sumber daya ekonomi produktif yang telah menghidupi sebagian besar masyarakat mesti menjadi prioritas. Daerah harus menata pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan pelaku ekonomi di daerah. Setiap lapisan masyarakat harus mendapatkan akses yang sama dalam memanfaatkan sumber daya produktif yang ada di daerah. Masyarakat tidak hanya diberi kesempatan sebatas mengakses sumber daya produktif yang ada tetapi juga kesempatan dalam mengakumulasi modal dan prasarana penunjang pengembangan perekonomian daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar untuk dijadikan sebagai modal dasar pembangunan daerah. Investasi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi Topografi yang strategis dan potensial merupakan modal produktif dalam pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat. Posisi yang strategis di perlintasan Bengkulu dan Sumatera Barat dan terletak pada jalan utama yang pulau Sumatera bagian barat.

Setiap kebijakan dan program yang ada dalam rencana umum penanaman modal Kabupaten Pesisir Selatan nantinya mesti berdasarkan pertimbangan kapasitas produktif daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara komprehensif sehingga

keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan ke depan (*forward linkages*), keluar dan ke dalam, serta ke hulu dan ke hilir terlihat jelas memberikan *multiplier effect*. Inilah kondisi riil yang dihadapi dalam mengembangkan rencana umum penanaman modal daerah. Tantangannya adalah bagaimanakah pengambil kebijakan di daerah merumuskan dan mengimplimentasikannya dalam arti yang sebenarnya. Secara konkrit berhasil atau tidak suatu kebijakan pembangunan akan tercermin pada kinerja perekonomian daerah tersebut. Pada tataran demikian sinergis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci esensial dalam merancang dan melaksanakan rencana umum penanaman modal daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan kapasitas produktif daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi daerah maka pelibatan pihak swasta dalam bentuk penanaman modal mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam memperkuat fundamental ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dari berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi. Dalam konteks ini penanaman modal merupakan motor yang akan menggerakkan percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi dan makin merata pula. Muara dari penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan adalah meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan antar kelompok dan golongan pendapatan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik dipusat maupun di daerah.

Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing

pihak. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang salah satunya adalah RUPM Kabupaten Pesisir Selatan.

RUPM ini merupakan pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di kabupaten Pesisir Selatan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

1.2. Azas dan Tujuan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain. Karena itu RUPM ini memiliki asas dan tujuan yang jelas. Adapun Asas Penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal;
4. Kepastian Hukum;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi Berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan Lingkungan; dan
9. Kemandirian.

Sedangkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

1.3. Visi dan Misi Penanaman Modal

RUPM Kabupaten Pesisir Selatan juga harus memiliki Visi dan Misi. Visi dan Misi ini diperlukan supaya target dan tujuan serta upaya untuk mencapainya menjadi lebih jelas dan terukur. Adapun Visi dan Misi RUPM Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

1.3.1. Visi Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan:

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Mandiri, Unggul, dan Berwawasan Lingkungan Untuk Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”

1.3.2. Visi Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk mencapai visi penanaman modal Kabupaten Pesisir Selatan ditempuh melalui beberapa misi:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu tujuan utama penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan hasil dan kualitas produk pertanian dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi dan UMKM
3. Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif, berdaya saing tinggi, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatkan kualitas aparatur dan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk peningkatan pelayanan penanaman modal terhadap investor di Kabupaten Pesisir Selatan

1.4. Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal

Landasan idiil dari Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan pedoman antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMP (2010-2014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika penulisan yang berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Asas dan Tujuan
- 1.3. Visi dan Misi Penanaman Modal
- 1.4. Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal
- 1.5. Sistematika Penulisan Laporan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- 2.1. Kondisi Georafis
- 2.2. Potensi Pengembangan Wilayah
- 2.3. Demografi
- 2.4. Pendapatan Domestik Regional Bruto

BAB III. Arah Kebijakan Penanaman Modal

- 3.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
- 3.2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal yang Berdasarkan Kawasan
- 3.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
- 3.4. Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
- 3.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- 3.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/ atau Insentif Penanaman Modal;
- 3.7. Promosi Penanaman Modal

BAB IV Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

- 4.1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat
- 4.2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
- 4.3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
- 4.4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

BAB V Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. Kondisi Geografis

A. Karakteristik Lokasi

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2° 28,6' Lintang Selatan dan 100°19'-101°18' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu
 Sebelah Utara : Kota Padang
 Sebelah Timur : Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi
 Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Berdasarkan administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, 182 nagari. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 5749,89 KM². Kecamatan terluas di Pesisir Selatan adalah kecamatan lengayang yaitu 590,60 KM² atau mencapai 10,27 dari luas keseluruhan. Sebaliknya, kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan Bayang yaitu 77,50 KM² atau hanya sebesar 1,35% dari luas keseluruhan. Namun demikian, jumlah nagari terbanyak dimiliki oleh kecamatan Koto XI Tarusan Jurai yaitu sebanyak 23 nagari. Kecamatan yang memiliki nagari paling sedikit adalah kecamatan IV nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 6 nagari.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
		(Km ²)	persen		
Silaut	Silaut	365,50	6,36	10	27
Lunang	Lunang	564,00	9,81	10	28
Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	365,28	6,35	10	20
Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	312,22	5,43	10	20
Pancung Soal	Inderapura	426,10	7,41	10	24
Airpura	Tamuan	314,00	5,46	10	20
Linggo Sari Baganti	Air Haji	315,41	5,49	16	43
Ranah Pesisir	Balai Selasa	564,39	9,82	10	27
Lengayang	Kambang	590,60	10,27	9	45
Sutera	Surantih	445,65	7,75	12	32
Batang Kapas	Pasar Kuok	359,07	6,24	9	29

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
		(Km2)	persen		
IV Jurai	Salido	373,80	6,50	20	52
Bayang	Pasar Baru	77,50	1,35	17	45
IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	250,72	4,36	6	17
Koto XI Tarusan	Nanggalo	425,63	7,40	23	51
Pesisir Selatan		5.749,89	100,00	182	480

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015

B. Topografi

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 19 sungai. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 70,54 persen hutan lebat dan 13,37 persen hutan belukar, lahan sawah 6,07 persen, perkebunan 2,30 persen dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya.

Kondisi topografi wilayah memiliki keberagaman kemiringan lereng berkisar antara 0-40 persen dan > 40 persen. Klasifikasi Kemiringan lereng meliputi (1) Kemiringan 0–8 persen yang merupakan kemiringan datar dengan luas 198.091 Ha (32,80 persen); (2) Kemiringan 8–15 persen yang merupakan kemiringan agak landai dengan luas 10.405 Ha (1,72 persen); (3) Kemiringan 15–25 persen yang merupakan kemiringan landai dengan luas 160.221 Ha (26,53 persen); (4) Kemiringan 25–40 persen yang merupakan kemiringan agak curam dengan luas 153.008 Ha (25,33 persen); (5) Kemiringan > 40 persen yang merupakan kemiringan curam dengan luas 82.252 Ha (13,62 persen).

Fisiografi wilayah terbentuk dari perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit Barisan ke arah barat dan proses aluvial marine. Dari sisi geologis daerah ini termasuk pinggir dari patahan semangko yang membujur dari utara ke selatan. Lahan dengan kemiringan yang terjal dan lahan rawa disepanjang pantai mendominasi daerah ini. Oleh karena itu luas daratan yang dapat dibudidayakan relatif sempit

C. Jenis Tanah

Jenis tanah di Pesisir Selatan terdiri dari tanah organosol, alluvial, regosol, andosol, podsolik, dan latosol. Tanah organosol disebut juga sebagai tanah gambut, tersusun dari timbunan bahan organik dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter di atas permukaan tanah.

- a. Jenis tanah alluvial adalah tanah dengan derajat keasaman (PH) yang rendah, kejenuhan basa rendah, struktur tanah

kurang baik, dan rasio kualitas unsur hara yang terdapat di dalam tanah yang bervariasi, digunakan sebagai lahan padi sawah, palawija, nanas, dan tanaman lain-lainnya.

- b. Jenis tanah regosol merupakan tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah, selain itu tanah ini juga peka terhadap erosi, cocok dipakai sebagai lahan untuk tanaman tembakau, tebu, palawija dan sayur sayuran.
- c. Jenis tanah andosol merupakan tanah yang kesuburan kimianya rendah, namun memiliki kemampuan menahan air yang baik, cocok bila ditanam padi sawah. Selain padi tanah ini cocok untuk penanaman sayur sayuran, buah, bunga, teh, kopi, dll.
- d. Jenis tanah podsolik memiliki ciri khas pada warnanya. Faktor pembatas pada tanah podsolik merah kuning adalah adanya lapisan pada yang dangkal, konkresi zat besi, defisiensi unsur hara mikro serta pH tanah yang rendah (tanah masam) cocok untuk tanaman ubi rambat, tembakau, buah-buahan dan karet.
- e. Jenis tanah latosol merupakan tanah dengan status nutrisi yang rendah, selain itu, kandungan bahan organik pada tanah ini juga sedikit. Dapat disebut tanah ini mirip dengan Andosol, digunakan untuk penanaman kelapa sawit, coklat, kopi, teh dan karet.

Jenis tanah yang paling dominan di Pesisir Selatan adalah tanah latosol seluas 188,153 Ha (32,72%) dan tanah andosol seluas 181.399 Ha (31,55%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Kecamatan	Jenis Tanah					
		Organosol	Alluvia	Regosol	Andosol	Podsolik	Latosol
1.	Koto XI Tarusan	-	144	-	12.384	-	11.764
2.	Bayang	-	4.932	-	3.600	-	-
3.	IV Nagari Bayang Utara	-	11.232	-	-	23.829	7.502
4.	IV Jurai	-	1.800	-	14.040	-	21.540
5.	Batang Kapas	-	2.656	-	14.616	-	18.635
6.	Sutera	-	5.976	-	14.720	-	23.869
7.	Lengayang	-	6.624	-	34.076	-	18.360
8.	Ranah Pesisir	-	6.556	-	26.885	-	22.998
9.	Linggo Sari Baganti	-	7.088	-	17.964	-	6.489
10.	Air Pura	4.644	10.440	4.860	19.282	-	34.784

No	Nama Kecamatan	Jenis Tanah					
		Organosol	Alluvia	Regosol	Andosol	Podsolik	Latosol
11	Pancung Soal						
12	Basa IV Balai	6.012	648	-	10.728	43.270	7.092
13	Ranah IV Hulu						
14	Lunang	31.174	-	12.204	13.104	21.348	15.120
15	Silaut						
	TOTAL	41.830	58.096	17.064	181.399	88.447	188.153

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

D. Penggunaan Lahan

Sebagian besar wilayah Pesisir Selatan merupakan hutan lebat. Kawasan hutan di Pesisir Selatan adalah sebesar 355.825 KM² atau mencapai 61,88% dari luas kabupaten keseluruhan. Peruntukan lahan untuk sawah, tegal/kebun/ladang, dan perkebunan masing-masingnya mencapai 4,47%, 1,09%, dan 5,91% dari luas keseluruhan.

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis penggunaan	Luas areal (ha)	Persentase (%)
1.	Kampung/Pemukiman	17.021	2,96
2.	Sawah	25.695	4,47
3.	Tegal/kebun/ladang	6.240	1,09
4.	Perkebunan	34.007	5,91
5.	Kebun campuan	24.174	4,20
6.	Hutan lebat	355.825	61,88
7.	Hutan belukar	62.532	10,88
8.	Hutan sejenis	2.086	0,36
9.	Semak/ alang-alang	11.523	2,00
10.	Hutan rawa	20.860	3,63
11.	Lainnya	15.026	2,61
Jumlah		574.989	100,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2014/2015

E. Cuaca, Iklim dan Perubahan Musim

Kondisi iklim di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung berawan dan musim hujan. Puncak curah hujan maksimum

terjadi sekitar bulan Januari dan Nopember. Sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan September. Suhu minimum terjadi antara bulan April sampai dengan Juni dan suhu maksimum terjadi antara bulan Januari dan Oktober dengan temperatur suhu udara berkisar antara 22° C–28° C dan 23° C–32° C serta kelembaban rata-rata 80 persen. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun tanpa ada bulan-bulan kering dengan jumlah hari hujan berkisar antara 13-15 hari perbulan.

Secara lebih rinci banyaknya hari hujan dan curah hujan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

No.	Bulan	Banyaknya hari Hujan (hari)	Banyaknya curah Hujan (mm)
1.	Januari	126,0	3.051
2.	Februari	97,0	1.916
3.	Maret	104,0	2.792
4.	April	188,0	2.589
5.	Mei	69,0	1.070
6.	Juni	86,0	2.127
7.	Juli	48,0	1.058
8.	Agustus	76,0	1.932
9.	September	37,0	640
10.	Oktober	56,0	1.302
11.	November	133,0	3.070
12.	Desember	112,0	2.532

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2014/2015

F. Hidrologi

Pesisir Selatan memiliki 19 sungai besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem jaringan sungai yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografi yang terpapar dari timur ke barat. Rata-rata sungai yang berada di Pesisir Selatan hulunya berasal dari Kabupaten Solok Selatan dan kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan debit rata-ratanya 29,696 m³/dtk (tahun 2008) dengan luas 6.232,02 km². Selain dari sungai sebagai sumber daya air, potensi ketersediaan air tanah cukup memadai, yaitu 9.420,44 juta m³.

Batang Inderapura merupakan Sungai terpanjang dengan panjang aliran sungai 93,70 km² dan luas daerah aliran sungai 2.035.89 km² serta debit aliran sebesar 7,315 m³/dtk. Sungai ini melalui empat kecamatan yaitu Kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Basa IV Balai, dan Linggo Sari Baganti. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Painan dengan panjang aliran sungai

13,61 km dan luas daerah aliran sungai 23,36 km² serta debit aliran sebesar 0,084 m³/dtk. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Sungai-Sungai yang Mengalir ke Pantai Barat Sumatera

No.	Nama Sungai	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Sungai (Km)	Luas DAS (Km ²)	Debit Rata-rata (M ³ /dtk)
1	Batang Lunang	Lunang Silaut		1087,5	3,907
2	Batang Tapan	BAB Tapan		711,12	2,55
3	Batang Inderapura	Air Pura, Pancung Soal, BAB, LSB	93,70	2,035.89	7,315
4	Batang Air Haji	Linggo SBaganti	45,85	367,37	1,319
5	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	51,11	498,86	1,792
6	Batang Kambang	Lengayang	45,75	457,14	1,642
7	Batang Surantih	Sutera	45,69	297,1	1,067
8	Batang Kapas	Batang Kapas	37,12	449,67	1,620
9	Batang Lumpo	IV Jurai	32,71	120,53	0,430
10	Batang Bayang	Bayang	43,86	396,17	1,423
11	Batang Tarusan	Koto Xi Tarusan	52,47	508,34	1,826
12	Batang Salido	IV Jurai	18,16	85,10	0,305
13	Batang Painan	IV Jurai	13,61	23,36	0,084
14	Batang Amping Parak	Sutera	17,41	110,47	0,396
15	Batang Lakitan	Lengayang	29,18	117,78	0,423
16	Batang Punggasan	Linggo SB	20,84	142,07	0,510
17	Batang Bantaian	Linggo SB	16,06	103,38	0,371
18	Batang Sindang	Lunang Silaut	43,47	239,17	0,859
19	Batang Silaut	Lunang Silaut	56,43	516,89	1,857
	Jumlah		663,42	6.232,02	29,696

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian

Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.116.574.260,- dari total PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 7.816.444.050,- atau sebesar 39,87%. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB daerah.

1) Padi dan Palawija

Komoditi Padi dan Palawija yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Statistik daerah menunjukkan jenis komoditi padi dan jagung mengalami pertumbuhan luas panen yang positif. Walaupun luas panen bertambah, produktifitasnya menurun tipis, hal ini disebabkan

belum adanya jaringan irigasi di beberapa lokasi pembukaan sawah baru dan masih mengandalkan hujan untuk pengairan sawah. Analisis pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas dari komoditas padi dan palawija di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

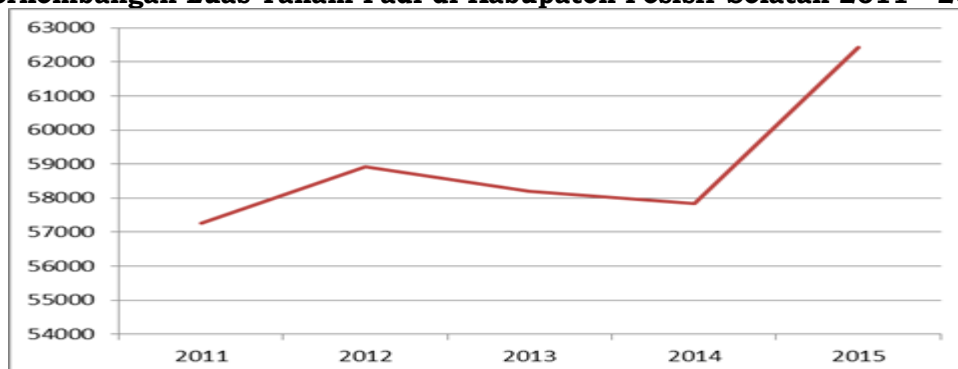
Tabel 2.6
Pertumbuhan Luas Panen Padi dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi	53335	53445	54038	54868	61061	62327
2	Jagung	961	9359	12008	13248	14208	12916
3	Ubi	404	345	374	384	420	433
4	Ubi Jalar	84	87	104	67	58	24
5	Kacang Kedelai	284	303	23	85	163	0
6	Kacang Tanah	934	784	798	459	330	275
7	Kacang Hijau	178	214	166	112	61	44

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

Secara khusus padi merupakan salah satu komoditas andalan Pesisir Selatan. Pengembangan komoditas beras sangat berpotensi di Pesisir Selatan. Luas tanam komoditas padi di Pesisir Selatan terus meningkat selama periode 2011 – 2015. Namun demikian penambahan luas tanam padi sedikit berfluktuasi. Pada tahun 2012, luas tanam padi meningkat sebesar 2,87% dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2013 dan 2014. Kenaikan luas tanam padi lebih rendah dibanding kenaikan luas tanam pada tahun 2012. Hal ini tercermin dari penambahan luas tanam padi pada tahun 2013 dan 2014 yang hanya sebesar 1,23% dan 0,60% masing-masingnya. Walaupun demikian, pada tahun 2015, luas tanam padi kembali naik secara tajam sebesar 7,94%.

Gambar 2.1.
Perkembangan Luas Tanam Padi di Kabupaten Pesisir Selatan 2011 - 2015



Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2016

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa dari beberapa komoditi yang dianalisis terlihat bahwa padi, ubi kayu dan ubi jalar mengalami peningkatan produktivitas, sedangkan jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau mengalami stagnan ataupun penurunan produktivitas.

Tabel 2.7
Perkembangan Produksi dan Produktifitas Padi dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)						Produktifitas Rata-Rata (Ton/Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Padi	25295	249352	261394	269363	313705	317383	4.19
2	Jagung	55213	83844	9903	105036	107695	108894	15.2
3	Ubi	7477	7763	8453	9682	1338	15263	21.21
4	Ubi Jalar	688	741	1.303	1166	1141	1657	20.47
5	Kacang Kedelai	383	505	35	128	247	0	
6	Kacang Tanah	1497	1598	1039	1102	516	495	1.78
7	Kacang Hijau	286	299	191	131	71	51	1.27

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

2) Sayuran dan Buah-Buahan

Komoditi sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup beragam. Komoditi sayuran di Pesisir Selatan mencakup cabe, terong, mentimun, bawang merah, bayam, dan kangkung. Sedangkan, komoditas buah-buahan yang dihasilkan di Pesisir Selatan adalah semangka, rambutan, mangga, durian, pisang, jeruk, duku, belimbing, salak, manggis, pepaya, dan alpukat.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Luas Panen Sayuran dan Buah-buahan

No	Komoditi	Luas Panen					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Sayuran						
1	Cabe	343	348	280	296	302	338
2	Terong	205	165	191	196	164	175
3	Mentimun	171	153	235	235	195	186
4	Bawang Merah	31	31	34	34	66	31
5	Bayam	121	103	104	82	133	123

No	Komoditi	Luas Panen					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Kangkung	132	119	118	106	160	144
No	Buah-buahan						
1	Semangka	711	518	522	461	306	559
2	Rambutan	14406	48806	10879	15178	24927	30736
3	Mangga	28742	81326	33909	22736	22601	15633
4	Durian	25002	58509	46340	30689	40049	33896
5	Pisang	532699	573224	270487	213466	217613	170789
6	Jeruk	63073	52775	18229	14770	15162	13634
7	Duku	0	1970	2197	928	913	7074
8	Belimbing	531	1287	858	585	589	451
9	Salak	63940	75300	10240	10240	14453	13078
10	Manggis	2540	6261	6707	6707	7007	14299
11	Pepaya	16700	22023	7387	7387	7892	6162
12	Alpukat	1611	2111	6707	6707	7007	947

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

Dari komoditi sayuran tersebut, hanya mentimun yang mengalami peningkatan produktivitas, sedangkan komoditi lainnya mengalami stagnasi maupun penurunan. Untuk komoditi buah-buahan, beberapa komoditi yang menjadi andalan adalah durian, mangga, dan manggis.

Tabel 2.9
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan

No	Komoditi	Produksi (Ton)						Produktifitas Rata-rata (Ton/Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Sayuran							
1	Cabe	615	3084	2395	2227	2276	2584	6.99
2	Terong	614	1435	1753	2329	1692	1707	8.8
3	Mentimun	1947	1858	2283	3222	3245	3010	13.3
4	Bawang Merah	126	235	371	271	502	243	7.66
5	Bayam	518	453	520	411	665	636	4.81
6	Kangkung	559	616	633	550	800	735	5.01
No	Buah-buahan							
1	Semangka	11771	9287	9311	9110	7020	1086	16.16
2	Rambutan	1144	3912	860	1214	1994	2780	0.08
3	Mangga	125	4816	2704	1819	1816	2751	0.08
4	Durian	15650	7023	5951	4192	4806	4876	0.21
5	Pisang	6911	11956	8112	6404	6529	17282	0.04
6	Jeruk	167	324	10553	11807	15162	5187	0.46
7	Duku	0	115	111	742	730	614	
8	Belimbing	11	50	34	26	30	32	0.04
9	Salak	1781	873	257	133	188	251	0.02
10	Manggis	229	564	384	604	631	1496	0.09

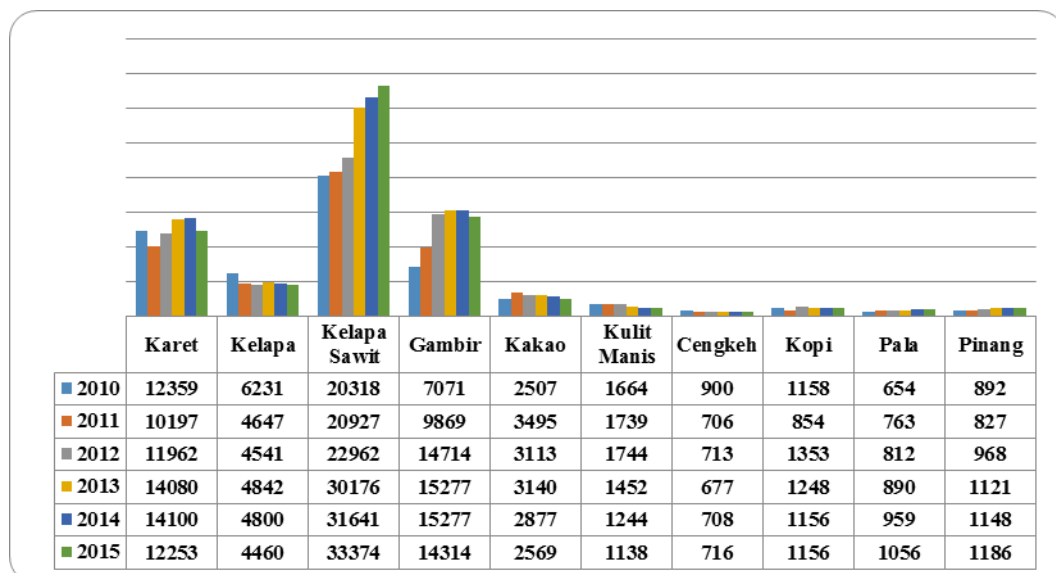
11	Pepaya	234	558	259	277	316	732	0.05
12	Alpukat	24	61	52	46	44	55	0.02

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

3) Perkebunan

Beberapa komoditi perkebunan yang dihasilkan merupakan komoditi unggulan daerah seperti karet, kelapa, kelapa sawit, gambir, dan kakao. Di samping itu, juga masih terdapat beberapa komoditi lainnya: seperti kulit manis, cengkeh, kopi, pala dan pinang. Sebagian besar komoditi perkebunan ini belum dikembangkan dengan baik karena sifatnya masih bersifat perkebunan rakyat dengan kemampuan pengembangan pengelolaan yang masih terbatas.

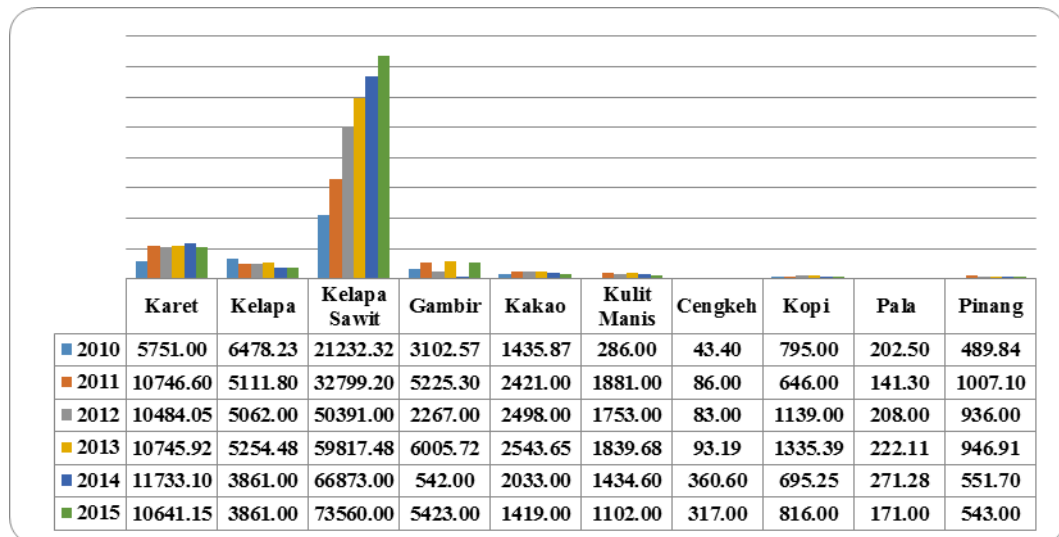
Gambar 2.2
Luas Tanam Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha)



Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

Jika dilihat dari luas tanamnya, komoditi kelapa sawit menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu dari 20.318 Ha pada tahun 2010 menjadi 33.374 Ha di tahun 2015. Hal ini dapat diartikan adanya potensi yang besar dan minat yang tinggi dari masyarakat untuk mengembangkan komoditi ini.

Gambar 2.3
Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan (Ton)



Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

Secara produktivitas, komoditi yang mengalami pertumbuhan produktivitas dibanding 5 tahun yang lalu, yaitu karet, kakao, kulit manis, dan cengkeh, kopi, pala, pinang. Sedangkan komoditi lain mengalami penurunan produktivitas. Komoditi yang memiliki komoditas tertinggi selama lima tahun terakhir adalah kelapa dan kelapa sawit dengan produktivitas masing-masingnya mencapai 1,06 dan 1,58 ton/Ha. Sedangkan komoditas yang memiliki produktivitas paling rendah adalah cengkeh yang hanya mencapai 0,27 ton/Ha.

Tabel 2.10
Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2015

No	Jenis Komoditi	Produktifitas (Ton/Ha) Tahun						Produk si Rata-Rata Ton/Ha
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Karet	0,47	1,05	0,88	0,76	0,83	1,40	0,90
2	Kelapa	1,04	1,10	1,11	1,09	0,80	1,20	1,06
3	Kelapa Sawit	1,05	1,57	2,19	1,98	2,11	6,0	1,58
4	Gambir	0,44	0,53	0,38	0,39	0,35	0,80	0,48
5	Kakao	0,57	0,69	0,80	0,81	0,71	0,80	0,60
6	Kulit Manis	0,17	1,08	1,01	1,27	1,71	-	0,78
7	Cengkeh	0,05	1,12	0,12	0,14	0,51	0,50	0,19
8	Kopi	0,69	0,76	0,84	1,07	0,60	1,00	0,83
9	Pala	0,31	0,19	0,26	0,25	0,28	0,30	0,27
10	Pinang	0,55	1,22	0,97	0,84	0,48	0,40	0,74

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

4) Kehutanan

Pesisir Selatan merupakan daerah yang di satu sisinya ditutupi oleh hutan dan sisi lainnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Lebih kurang 74% dari luas wilayahnya merupakan hutan, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW). Hutan TNKS merupakan bagian terbesar, yaitu sebesar 51,01%, sedangkan sisanya adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam wisata dengan luas yang hampir sama seperti terlihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.11
Luas Hutan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015

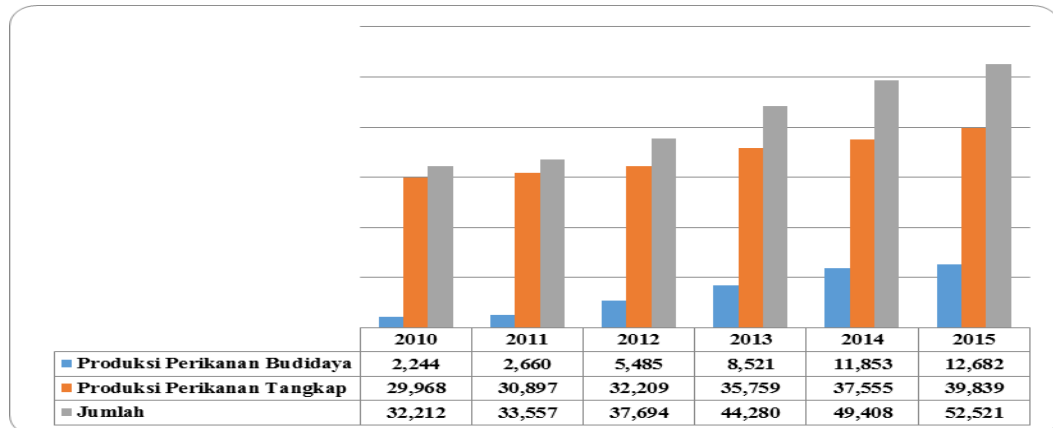
No	Jenis Hutan	Luas Area	Persentase
	Hutan Lindung		
1	Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW)	295,63	51,01
2	Hutan Lindung (HL)	23,10	3,99
	Kawasan Budidaya		
3	Hutan Produksi (HP)	5,30	0,91
4	Hutan Produksi Konversi (HPK)	25,38	4,38
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	31,74	5,43
	Area Penggunaan Lain		
6	Perairan Darat	1,85	0,32
7	Pemukiman	14,57	2,51
8	Perkebunan	59,15	10,21
9	Pertanian	107,84	18,61
10	Pertambangan	14,95	2,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

5) Perikanan Darat dan Laut

Secara geografis, di sebelah barat Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dengan panjang pantai ± 234 Km. Selama beberapa tahun terakhir, telah tumbuh beberapa sentra penangkapan dengan aktifitas yang cukup tinggi, yakni Kecamatan Koto XI Tarusan yang telah dilengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan Pendaratan Ikan Carocok Tarusan, Kecamatan Sutera yang telah memiliki Pelabuhan Perikanan Sutera, Kecamatan Lengayang yang telah dilengkapi dengan Pelabuhan Perikanan Kambang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Gambar 2.4
Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (Ton)
Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2015

Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 2.244 ton pada tahun 2010 menjadi 12.682 ton pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh bergairahnya kembali minat masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan yang tentu saja tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk penyediaan sarana prasarana penunjang seperti pembuatan kolam dan keramba jaring apung serta pelatihan dan pemberian benih ikan unggul bagi pelaku perikanan.

Selain itu, produksi perikanan tangkap juga mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari adanya bantuan fasilitas tangkap yang lebih baik, seperti bantuan mesin tempel, pemberian *GPS fish finder* dan alat tangkap lainnya bagi nelayan.

Di samping memproduksi ikan segar, masyarakat juga memproduksi ikan kering, antara lain ikan teri dan ikan asin. Khusus untuk ikan teri, terutama ikan teri super merupakan salah satu produk olahan ikan andalan karena selain rasanya yang gurih, teri yang dihasilkan juga tergolong berkualitas baik.

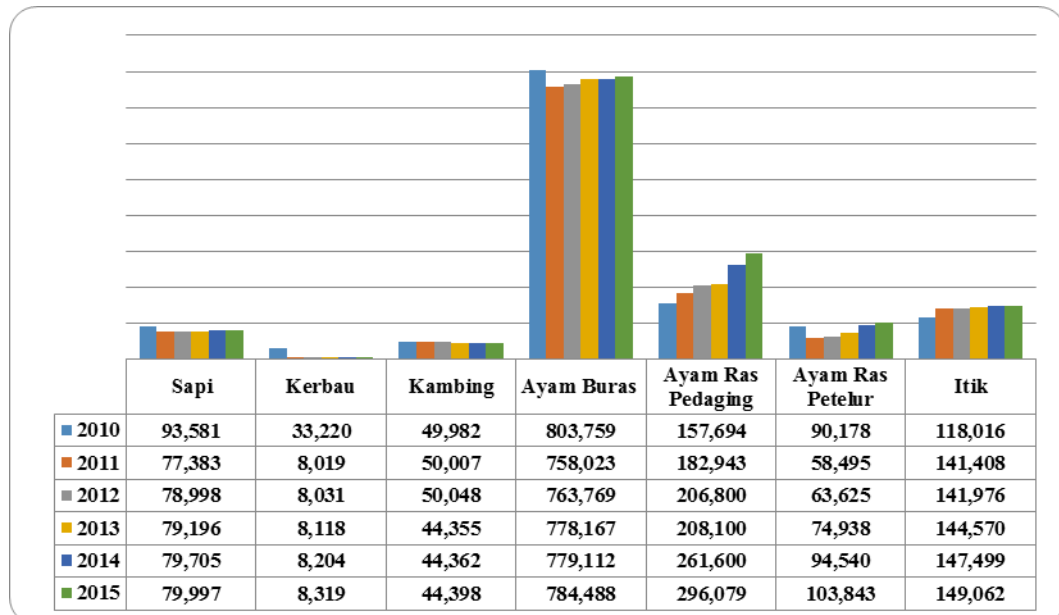
6) Peternakan

Sumbangan subsektor peternakan terhadap pertumbuhan perekonomian Pesisir Selatan semakin nyata seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kawasan Agropolitan. Dengan usaha peternakan ini daya tahan ekonomi rumah tangga semakin baik dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan. Beberapa jenis ternak yang umum dikembangkan masyarakat antara lain sapi, kambing, kerbau, dan unggas.

Sapi lokal Pesisir memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan daging di Pesisir Selatan dan Kabupaten tetangga seperti Bengkulu dan Jambi. Sejak tahun 2011, populasi sapi lokal Pesisir Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Pada

tahun 2015, populasi sapi Pesisir Selatan mencapai 79.997 ekor. Namun demikian, jumlah populasi sapi lokal pada tahun 2015 masih lebih sedikit dibanding populasi pada tahun 2010.

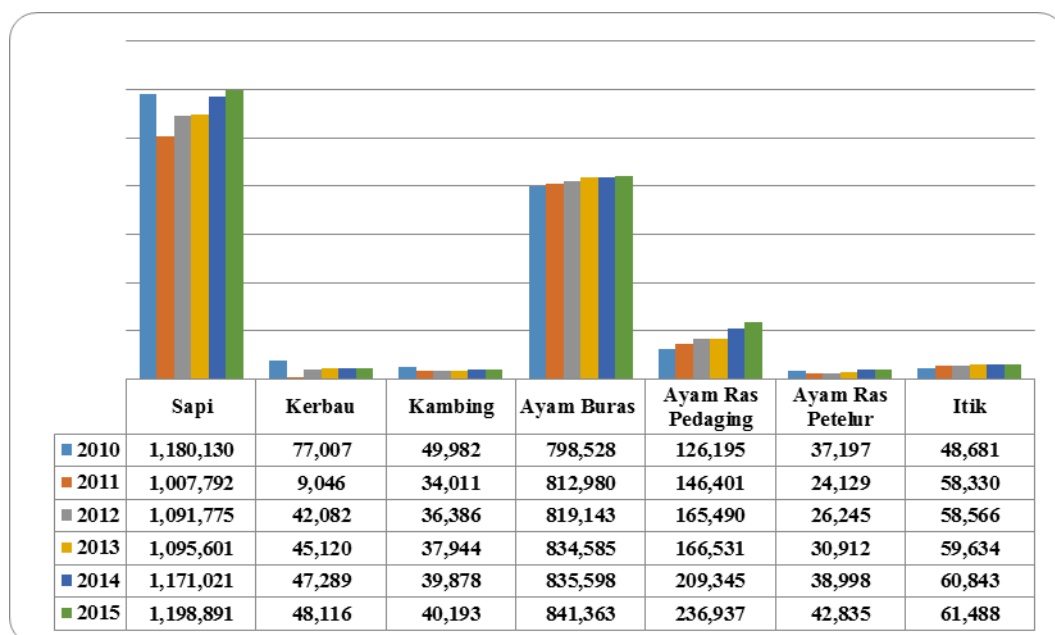
Gambar 2.5
Populasi Ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (ekor)
Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan, 2015

Walaupun populasi sapi pada tahun 2015 lebih sedikit dibanding tahun 2010, namun produksi daging pada tahun 2015 lebih besar dibanding produksi tahun 2010. Hal ini tercermin dari produksi sapi lokal Pesisir yang mencapai 1.198.891 Kg pada tahun 2015 lebih tinggi dari 1.180.120 Kg pada tahun 2010. Sebaliknya, produksi kerbau pada tahun 2015 lebih rendah dibanding produksi kerbau pada tahun 2010. Hal ini tercermin dari produksi kerbau yang hanya mencapai 48.116 Kg pada tahun 2015 lebih rendah dari 77.007 Kg pada tahun 2010.

Gambar 2.6
Produksi Daging di Kabupaten Pesisir Selatan (kg)
Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan, 2015

Dalam rangka menjamin pasar bagi ternak masyarakat yang mau dijual juga telah dibangun sebuah pasar ternak yang cukup representatif di Koto Rawang Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang. Saat ini pasar ini berfungsi juga sebagai pasar harian ternak, karena setiap harinya selalu terjadi transaksi jual beli ternak. Selanjutnya jika di lihat dari produksi daging unggas, maka ayam buras memiliki populasi terbesar, yaitu 84.488 ekor dan produksi daging terbesar, yaitu sebesar 841.363 kg. Populasi dan produksi ayam buras ini menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kecamatan Lengayang sebagai penyumbang populasi dan produksi terbanyak.

7) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor andalan Kabupaten Pesisir Selatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini guna mendukung amanat Nawacita RPJMN 2015-2019, yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan dimensi pembangunan sektor unggulan pariwisata. Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja keluar dari daerah tertinggal, menyadari besarnya potensi dan perlunya pengelolaan pariwisata yang baik.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025,

bahwa secara perwilayahan, destinasi pariwisata dibagi menjadi 4 (empat) destinasi utama pariwisata kabupaten (DUPK), seperti terlihat pada Tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.12
Perwilayahan Destinasi Pariwisata
di Kabupaten Pesisir Selatan

WILAYAH DESTINASI	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK Carocok dan Sekitarnya	Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai	Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera	-
DUPK Mandeh dan Sekitarnya	Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan	Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara	-
DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	Pasir Putih, Kecamatan Lengayang	Kecamatan Ranah Pesisir	Kecamatan Linggosari Baganti
DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya	Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Kecamatan Lunang	Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Beragam potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, seperti wisata alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia (*event*) perlu dikembangkan guna menunjang dan meningkatkan perekonomian daerah. Sebaran daya tarik wisata dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Daya Tarik Wisata Pada Setiap DUPK
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Wilayah Destinasi	Daya Tarik Wisata			
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Hasil Buatan Manusia	Wisata Lingkungan
1	DUPK Carocok dan Sekitarnya	21	1	2	-
2	DUPK Mandeh dan Sekitarnya	15	4	2	-
3	DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	6	2	-	-
4	DUPK Rumah Gadang Mande Rubiah & sekitarnya	2	3	-	1

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Pada wilayah DUPK Carocok dan sekitarnya terdapat destinasi seperti Pulau Cingkuak, Pulau Karabak, Pulau Kasiak, Air Terjun Timbulun, Pantai Carorok Painan, Puncak Langkisau, Pantai Salido, Benteng Peninggalan Portugis, Makam Madame Van Kempen, Event Festival Langkisau dan beberapa atraksi wisata, seperti banana boat, jet ski dan lain-lain. Di wilayah DUPK Mandeh dan sekitarnya terdapat destinasi yang sudah banyak dikenal masyarakat seperti Pulau Cubadak (Kawasan Mandeh), Pulau Sironjong Ketek, Pulau Sirinjong Gadang, Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar dll. Di wilayah DUPK Pasir Putih dan sekitarnya terdapat beberapa destinasi yang menarik masyarakat untuk berwisata seperti Pasir Putih Kambang, Pantai Sumedang, Air Terjun Sei Liku, Air Terjun Palangai Gadang, Pulau Beringin, Pulau Gosong, Rumah Percetakan Uang, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah DUPK Rumah Gadang Mande Rubiah dan sekitarnya terdapat destinasi, diantaranya: Rumah Gadang Mande Rubiah, Istana Inderapura, Makam Bundo Kanduang, Makam Cindua Mato, Taman Nasional Kerinci Seblat.

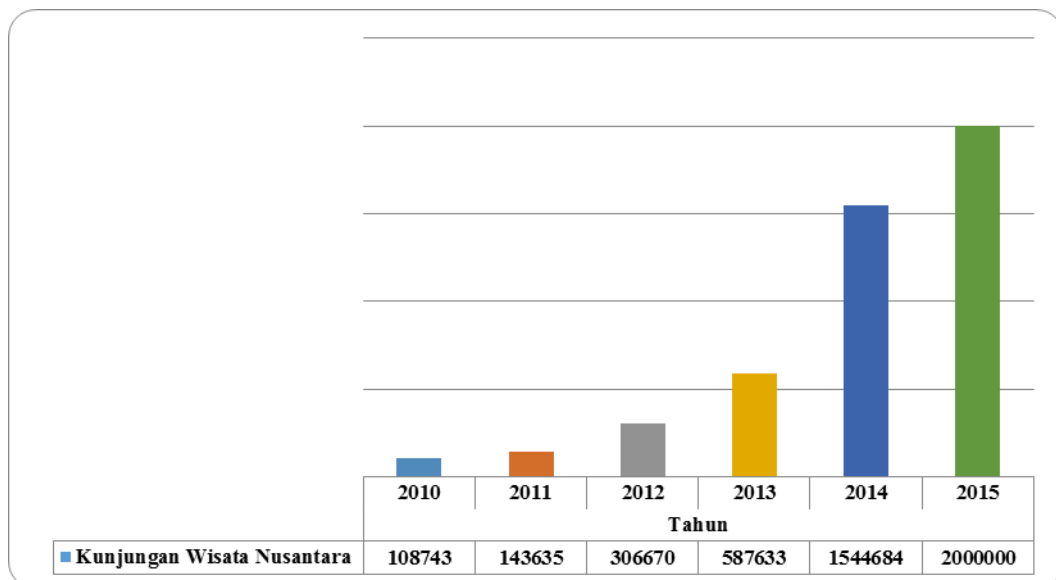
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah pantai yang sangat panjang dan mempunyai pulau-pulau kecil. Garis pantai dan pulau-pulau kecil merupakan wisata bahari yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Dari empat DUPK yang ada, DUPK Carocok dan sekitar sudah mulai tumbuh wisata bahari atau event-event bahari seperti memancing, diving, snorkling dan event bahari lainnya, namun pada DUPK lainnya masih belum berkembang.

Untuk memajukan pariwisata daerah maka dilakukan promosi. Melalui program promosi dan pemasaran pariwisata beberapa upaya yang dilakukan antara lain; Festival Langkisau, Tour de Singkarak, Lomba Mancing, Mountain Bike, Paragliding, pendistribusian bahan promosi berupa leaflet ke hotel, maskapai penerbangan nasional dan internasional, termasuk ke pihak biro perjalanan yang bergerak dalam pelayanan jasa yang bersifat internasional.

Di samping itu pengembangan wisata bahari ditandai dengan telah dicanangkan sebagai **“Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh”** oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 10 Oktober 2015 disungai nyalo kawasan mandeh, sehingga membuka mata dunia internasional bahwa sedang terjadi Kebangkitan Dunia Kepariwisata di Pesisir Selatan. Adapun kawasan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu kawasan wisata yang dikelola secara nasional dan akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Dengan semakin gencarnya promosi dan penyebaran informasi tentang pengembangan kepariwisataan di Kawasan Mandeh dan Pesisir Selatan pada umumnya, maka timbul minat kunjungan wisatawan ke daerah ini. Terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan Nusantara pada tahun 2010 mencapai 108.743 orang pada tahun 2010. Kunjungan ini meningkat drastis hingga mencapai 2.000.000 orang pada tahun 2015. Secara rata-rata selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan kunjungan wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 86% setahun.

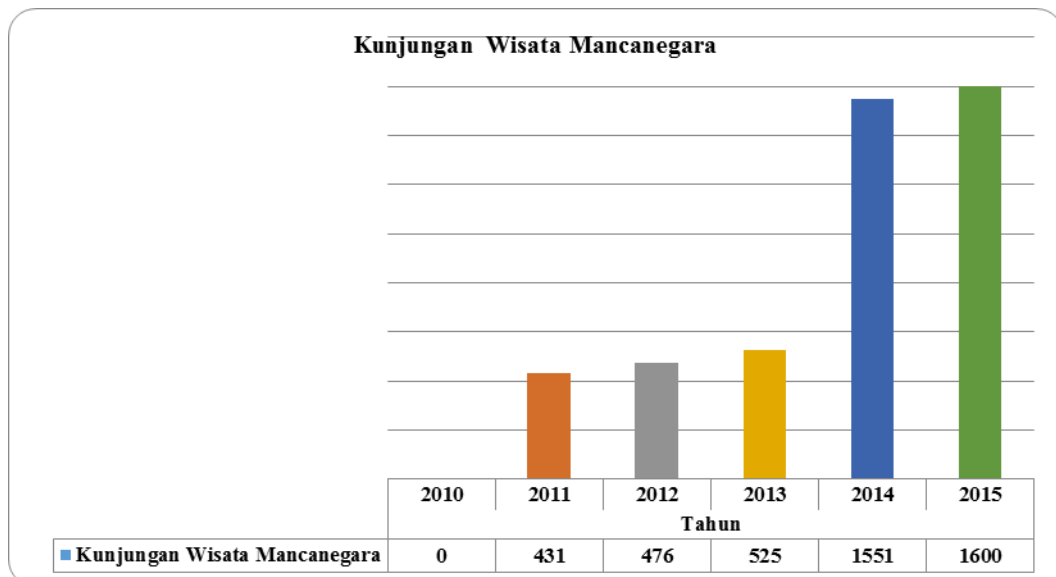
Gambar 2.7
Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan, 2015

Sementara itu, pada tahun 2010 kabupaten Pesisir Selatan tidak menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2011, kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Pesisir Selatan adalah 431 orang. Jumlah ini terus meningkat hingga menjadi 1600 orang pada tahun 2015. Secara rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2010 – 2015 mencapai 54,83%.

Gambar 2.8
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara
Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan, 2015

8) Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Secara keseluruhan, pada sektor industri kecil terjadi peningkatan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja serta nilai produksi yang dihasilkan. Tahun 2015, jumlah industri mengalami peningkatan sebesar 181,97% dari 1,015 unit pada tahun 2010 menjadi 1.847 unit pada tahun 2015. Jumlah ini terdiri dari 487 unit industri formal dan 1.360 industri non-formal. Selain itu jumlah tenaga kerja industri kecil juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4,405 tenaga kerja pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,550 tenaga kerja pada tahun 2015 atau meningkat 197,59%. Lebih lanjut jumlah usaha industri kecil di Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Usaha Industri Kecil Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015

N O	URUSAN/INDI KATOR	SA T	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	JUMLAH INDUSTRI KECIL	UNI T						

	a. Formal		330	379	391	418	447	487
	b. Non formal		685	767	982	1,237	1,310	1,360
2	JUMLAH TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL	ORG						
	a. Formal		1,695	1,865	1,927	2,610	2,219	2,435
	b. Non formal		2,810	3,168	3,260	4,558	4,837	5,115
3	NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL	RP						
	a. Formal		89,96 8,678	132,9 87,33 1	214,6 09,08 3	376,3 39,99 3	390,4 08,79 3	437,5 27,87 4
	b. Non formal		54,05 0,357	152,2 05,42 3	42,35 4,223	179,8 94,61 9	187,2 34,23 3	253,3 50,57 5

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Pesisir Selatan, 2015

9) Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pasar sebagai sarana kegiatan ekonomi di 15 Kecamatan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan sangat dibutuhkan. Hal ini menyangkut kegiatan ekonomi disetiap kecamatan tidak sebanding dengan sarana pasar yang dimiliki. Oleh karena itu pada tahun yang akan datang pemerintah daerah berkewajiban untuk merencanakan dan menganggarkan program peningkatan pembangunan pasar di wilayah Pesisir Selatan guna memenuhi kebutuhan sarana pasar tersebut. Capaian pembangunan yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15
Indikator Perdagangan Dalam Kurun Waktu 2010-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemb. Pasar Nagari	Unit	-	-	-	1	5	5
2.	Jumlah koperasi	Koperasi	373	374	284	286	295	297
3.	Jumlah UMKM	Unit	1000	1014	4454	4440	4440	4440

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator yang mendukung kegiatan perdagangan antara lain; indikator pertama, pasar merupakan sarana penunjang terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat terjadi transaksi jual beli terhadap

barang dan jasa yang diperdagangkan, dari data tabel diatas menunjukkan bahwa pembangunan pasar nagari di Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun mengalami penambahan menjadi 5 unit pada tahun 2015.

Indikator perdagangan kedua, koperasi pada tahun 2010 yang berjumlah 373 unit berkurang menjadi 297 unit pada tahun 2015. Penurunan jumlah disebabkan koperasi tersebut belum mampu bersaing, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Sumber daya manusia rendah, kelembagaan, modal dan jenis kegiatan usaha koperasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 yang paling banyak adalah koperasi unit desa dan koperasi tani. Usaha koperasi seperti; jual beli hasil pertanian, perkebunan, produk kerajinan, produk makanan khas suatu daerah dan jenis produk dalam kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Indikator perdagangan yang ketiga yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 berjumlah 1.000 buah bertambah menjadi 4.440 buah pada tahun 2015.

10) Pertambangan

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berikut data potensi pertambangan kabupaten Pesisir Selatan tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Potensi Pertambangan di Kabupaten Pesisir Selatan
Sampai dengan 2015

No	Jenis Barang Tambang	Lokasi Kecamatan
1	Andesit	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lenggayang, Ranah Pesisir, Linggosaribaganti
2	Basalt	Sutera
3	Batu Setengah Permata	Pancung Soal
4	Batu Bara	IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Ranah Pesisir, Basa IV Balai Tapan, Pancung Soal, Ranah IV Hulu, Lunang
5	Batu gamping	Koto XI Tarusan
6	Batu pasir	Sutera
7	Diorit	Batang Kapas, Ranah Pesisir
8	Emas	IV Jurai
9	Granitis	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Batang Kapas, Lenggayang, Linggosaribaganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu, Lunang
10	Kaolin	Ranah Pesisir

No	Jenis Barang Tambang	Lokasi Kecamatan
11	Kuarsit	Koto XI Tarusan
12	Pasir Besi	Pancung Soal
13	Pasir Kuarsa	Koto XI Tarusan
14	Sirtu	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lenggayang, Ranah Pesisir, Linggosaribaganti, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu, Lunang
15	Tanah Liat	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lenggayang, Ranah Pesisir, Linggosaribaganti, Basa Ampek Balai, Ranah Ampek Hulu, Lunang, Silaut
16	Tanah Urug	Koto XI Tarusan, IV Jurai, Ranah Ampek Hulu
17	Tawas	Bayang
18	Toseki	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Lenggayang

Sumber : Dinas Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2014

Potensi pertambangan Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini memerlukan kajian dan analisis secara mendalam. Selain itu kebijakan pemerintah daerah tentang perizinan meliputi kelembagaan, pelayanan, dan ketepatan waktu sangat diperlukan. Dengan adanya berbagai kemudahan tersebut, diharapkan para investor berminat untuk menanamkan modalnya demi mempercepat pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

2.3. DEMOGRAFI

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 (Badan Pusat Statistik, BPS), dihitung dari jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah lebih dari 6 bulan, total penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 berjumlah 429.246 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 212.228 jiwa dan perempuan 217.018 jiwa. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 450.186 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 223.093 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 227.093 jiwa. Sebaran penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal, penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian penduduk yang meliputi kuantitas dan kualitas.

Tabel 2.17
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan
Tahun 2010-2015

Kecamatan	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Silaut	30.450	30.768	32.825	13.284	13.736	14.131
Lunang				19.622	20.129	20.548
Basa Ampek Balai Tapan	25.742	26.011	27.985	13.112	13.324	13.476
Ranah Ampek Hulu Tapan				13.935	14.269	14.539
Pancung Soal	37.002	37.389	39.248	24.428	24.997	25.451
Airpura				14.803	15.138	15.405
Linggo Sari Baganti	42.319	42.762	43.712	43.509	44.088	44.464
Ranah Pesisir	30.089	30.404	30.432	30.191	30.363	30.397
Lengayang	51.623	52.163	52.425	52.041	52.416	52.548
Sutera	46.019	46.500	48.015	17.867	48.680	49.270
Batang Kapas	30.829	31.151	31.334	31.111	31.341	31.430
IV Jurai	43.302	43.755	44.821	44.629	45.256	45.678
Bayang	36.697	37.081	38.548	36.743	36.928	36.945
IV Nagari Bayang Utara	7.276	7.352	7.101	7.279	7.314	7.314
Koto XI Tarusan	47.898	48.399	48.554	48.186	48.500	48.590
Pesisir Selatan	429.246	433.735	442.100	440.740	446.479	450.186

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka berbagai tahun penerbitan

2.4. PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

A. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selama periode 2010 hingga 2015 PDRB Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan. Secara rata-rata kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 40,55% pada kurun waktu tersebut. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian mencapai 41,3% kemudian turun menjadi 39,87% pada tahun 2015. Secara rata-rata kontribusi sektor pertanian turun sebesar 0,83% setiap tahunnya.

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Pesisir Selatan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor ini mencapai 11,38% dan terus meningkat menjadi 12,05% pada tahun 2015. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Secara rata-rata kontribusi sektor ini tumbuh sebesar 1,38% setiap tahunnya.

Tabel 2.18
Distribusi PDRB Pesisir Selatan

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	41.3	41.27	40.89	40.04	39.94	39.87
Pertambangan dan Penggalian	4.09	4.01	3.92	3.91	3.83	3.8
Industri Pengolahan	8.73	8.75	8.87	8.78	8.83	8.76
Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
Konstruksi	8.76	8.8	8.9	9.47	9.49	9.53
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.38	11.45	11.53	11.7	12.02	12.05
Transportasi dan Pergudangan	3.4	3.41	3.48	3.59	3.68	3.76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.03	1.02	1.01	0.98	0.96	0.94
Informasi dan Komunikasi	5.9	5.89	6.18	6.42	6.43	6.6
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.27	2.27	2.31	2.33	2.26	2.22
Real Estate	1.42	1.42	1.41	1.41	1.42	1.42
Jasa Perusahaan	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.83	6.85	6.51	6.33	6.05	5.9
Jasa Pendidikan	2.55	2.54	2.63	2.69	2.7	2.77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.17	1.17	1.21	1.23	1.25	1.27
Jasa Lainnya	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2016

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sedikit berfluktuasi dengan tren yang menurun selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah sebesar 5,73%. Angka ini merupakan yang paling rendah sejak 2010.

Selama periode 2010 – 2015 secara rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan sebenarnya turun sebesar 0.2%. hal yang sama juga ditunjukkan oleh pertumbuhan beberapa sektor ekonomi. Dari 17 sektor ekonomi yang ada, empat sektor diantaranya memiliki pertumbuhan yang negatif selama

periode 2010 – 2015. Sektor-sektor tersebut adalah industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan jasa lainnya. Disisi lain, sektor yang pertumbuhannya sangat cepat selama lima tahun terakhir adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor informasi dan komunikasi.

Tabel 2.19
Pertumbuhan Sektor dan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*	2015**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.70	4.84	3.71	5.55	5.55
B	Pertambangan dan Penggalian	3.52	3.55	5.50	3.88	4.64
C	Industri Pengolahan	6.03	7.33	4.83	6.32	4.89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.16	(4.81)	(2.85)	11.57	1.42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.03	6.04	4.25	4.23	4.18
F	Konstruksi	6.26	7.01	12.73	6.03	6.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.44	6.48	7.48	8.76	5.93
H	Transportasi dan Pergudangan	6.35	7.92	9.07	8.64	7.98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.16	4.79	2.34	3.63	4.28
J	Informasi dan Komunikasi	5.47	11.09	9.98	5.96	8.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.54	7.75	6.73	2.78	3.81
L	Real Estate	5.29	5.63	5.93	5.95	5.79
M,N	Jasa Perusahaan	5.38	5.47	5.52	5.38	5.40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.98	0.58	2.96	1.23	3.15
P	Jasa Pendidikan	5.39	9.39	8.31	6.36	8.16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.47	9.86	7.18	7.73	7.27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5.85	4.52	5.18	5.18	5.22
Produk Domestik Regional Bruto		5.78	5.81	5.90	5.80	5.73

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2016

**) angka sementara*

***) angka sangat sementara*

C. PDRB Perkapita

pdrb Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku selama 5 tahun meningkat rata-rata 8,60% per tahun yaitu dari Rp. 13,68 juta tahun 2010 menjadi Rp. 20,58 juta tahun 2014 dan diperkirakan pada tahun 2015 menjadi Rp. 20,58 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga

Konstan 2010 meningkat rata-rata 3,89% per tahun yaitu dari Rp. 13,68 juta tahun 2010 menjadi Rp. 16,54 juta tahun 2014 dan diperkirakan pada tahun 2015 menjadi Rp. 16,54 juta. PDRB per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.24

Tabel 2.20
PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2015

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	PDRB Per Kapita ADHK 2010 (Rp. Juta)
2010	13.68	13.68
2011	15.19	14.34
2012	16.77	15.03
2013	18.54	15.78
2014*)	20.58	16.54
2015**)	20.58	16.54

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015

***) angka sementara**

****) angka sangat sementara**

2.5. POTENSI UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI

1. Bidang Pariwisata

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dengan ibukotanya Painan yang berjarak $\pm 75 \text{ km}^2$ dari Kota Padang. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki cukup banyak destinasi wisata yang sudah menjadi tujuan wisata di Propinsi Sumatera Barat salah satunya adalah Pantai Carocok Painan dengan Pulau Cingkuak di Kecamatan IV Jurai dan Kawasan Wisata Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan, disamping itu masih terdapat objek wisata lainnya yaitu Bukit Langkisau, Air Terjun Banyang Sani, Air Terjun Timbulun, Jembatan Akar dan Batu Kalan Tarusan. Disamping itu Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki objek wisata sejarah yaitu Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Masjid Tua, Benteng Portugis dan kesenian tradisional yaitu Rabab Pasisie.

Kawasan Mandeh merupakan salah satu Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Tema Rencana Pengembangan Objek Wisata Kawasan Mandeh sebagai berikut:

Tabel 2.21
Potensi Investasi Kawasan Mandeh

No.	Jenis Pengembangan Wisata	Lokasi	Kegiatan	Potensi Investasi
1	Mandeh Boat Tour	Dari Carocok Tarusan ke beberapa pulau-pulau kawasan mandeh	Paket wisata mengitari perairan dan singgah pada beberapa pulau	Penambahan boat dan SDM yang bisa memandu pengunjung wisata
2	View Point Mandeh	Kelok Nona, Panorama 1, Batu Kajang, Puncak Mandeh, Puncak Paku, Batu Kuciang	Menikmati view Kawasan Mandeh	Pembangunan saran dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata
3	Area Kawasan Wisata Mandeh	Batu Kalang, Sungai Gemuruh, Pulau Setan, Kapo-kapo, Konversi Pulau Marak, Pamutusan Pagang.	Kegiatan Atraksi Wisata	Pembangunan Infrastruktur dan penambahan wahan atraksi

4	Wisata Bawah Air, Surfing, Pancing	P. Sironjong Gadang, P. Setan, Boeloongan Nederland, P. Marak, P. Pagang, P. Ular	Wisata bawah air, surfing, memancing dan permainan laut.	Penambahan sarana dan prasarana serta infrastruktur permainan laut
5	Pengembang Resort Wisata	Bukit Ameh	View indah yang dapat dinikmati	Pembangunan hotel, resort serta fasilitas lainnya untuk pembangunan sarana pariwisata. Pemilik lahan sudah bersedia untuk melepaskan ± 400 Ha tanah.
6	Penghijauan Kawasan Mandeh	Disemua pulau-pulau kawasan Mandeh	Penanaman pohon	Membutuhkan bibit pohon dan tanaman hijau
7	Konservasi penyu	Pulau Marak	Pembuatan tepat penangkaran penyu	Konservasi Biota Endemik kerjasama dengan WALHI, WWF dan Green Peace
8	Wisata Minat Khusus	Sungai Pisang, Sunya Nyalo, P. Sironjong, Bukit Batu Garuda, P. Kapo-kapo, Daratan Sungai Pinang	Petualangan Air Terjun, Climbing, Wisata Berburu dan Kemping	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur
9	Wisata Pedesaan	Nagari Ampang Pulai, Carocok Anai, Nagari Mandeh, Nagari Sungai Nyalo dan Nagari Sungai Pinang	Wisata Bahari dan Wisata Kuliner yang masih bersifat alam pedesaan	Pembangunan pusat kuliner dan pembangunan area wisata pedesaan

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Pesisir Selatan

Selain kawasan Mandeh masih ada potensi pariwisata lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Potensi Investasi Kawasan diluar Mandeh

No.	Jenis Pengembangan Wisata	Lokasi	Kegiatan	Potensi Investasi
1	Konversi Penyu	Pulau Semangki, Pulau Penyu Kecamatan IV Jurai	Pembuatan Tempat Penangkaran Penyu	Konservasi Biota Endemik kerjasama dengan WALHI, WWF dan Green Peace
2	Pengembangan Resort Wisata	Lumbuang Baruak Kecamatan Batang Kapas, Taratk Suratih dan Gunuang Rajo Kecamatan Sutera	Menikmati view kawasa dan atraksi wisata	Pembangunan sarana dan Prasarana Infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata
3	Wisata Minat Khusus	Pasir Putih Kecamatan Langayang	Wisata Kuliner khas Pesisir Selatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana
4	Wisata Air Laut	Pantai Carocok Painan Kecamatan IV Lurai	Berenang di air laut	Pembangunan kolam renang air laut

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Pesisir Selatan

Infrastruktur sebagai penunjang untuk menuju kawasan wisata sudah tersedia melalui jalan darat yang sudah layak dan cukup baik. Selain itu didukung oleh 24 (dua puluh empat) buah hotel/penginapan yang siap melayani pengunjung untuk menginap di dekat objek wisata serta 40 (empat puluh) buah restoran/rumah makan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

a. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang diharapkan untuk menopang perekonomian masyarakat dengan kegiatan utama diprioritaskannya peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing sehingga dapat menciptakan peluang investasi.

Komoditi padi dan palawija yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kedelai dan umbi-umbian. Jenis komoditi padi dan jagung mengalami pertumbuhan luas panen dan positif seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
Potensi Investasi Tanaman Paangan

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	lokasi	Status Kepemilikan	Peluang Investasi
1	Padi	57.834	431.365	15 Kec	Milik Masyarakat	RMU dan Perdagangan Beras
2	Jagung	12.938	107.695	15 Kec	Milik Masyarakat	Pabrik Makanan Ternak dan Makanan Ringan
3	Ubi Kayu	414	13.386	15 Kec	Milik Masyarakat	Pabrik Tapioka dan Makanan Ringan
4	Kacang Tanah	275	516	15 Kec	Milik Masyarakat	Pabrik Makanan Ternak

Sumber Data: Pesisir Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura Kab. Pesisir Selatan

b. Pekebunan

Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar prospeknya, karena masih terdapat lahan yang produktif untuk ditanami. Sebagian besar komoditi perkebunan belum dikembangkan dengan baik karena sifatnya masih perkebunan rakyat dengan kemampuan pengembangan pengelolaan yang masih terbatas. Komoditi perkebunan yang menjadi unggulan seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Potensi Investasi Sektor Perkebunan

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	lokasi	Status Kepemilikan	Peluang Investasi
1	Kelapa	4.800	3.861	15 Kec	Milik masyarakat	Pabrik pengolahan dan makanan ringan
2	Kelapa sawit	31.641	66.873	15 Kec	Swasta dan Masyarakat	Masih kekurangan pabrik pengolahan
3	Karet	14.100	11.733	15 Kec	Milik masyarakat	Pabrik pengolahan
4	Gambir	15.277	5.422	15 Kec	Milik	Pabrik

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	lokasi	Status Kepemilikan	Peluang Investasi
					masyarakat	pengolahan turunan gambir
5	Coklat	2.877	2.033	15 Kec	Milik masyarakat	Pabrik pengolahan

Sumber Data: Pesisir Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura Kab. Pesisir Selatan

Masih terdapat beberapa hasil perkebunan yang bisa dikembangkan usahanya seperti : kayu manis, cengkeh, kope pala, coklat, pinang, nilam dan gardamunggu.

3. Bidang Kelautan dan Perikanan

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dengan panjang pantai ±234 Km. Sentra penangkapan dan aktivitas yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan Pendaratan Ikan diantaranya di Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dibidang perikanan juga terdapa beberapa potensi peluang investasi serta yang sudah ada tersebut masih dapat dilakukan pengembangan diantaranya:

Tabel 2.25
Potensi Investasi Sektor Perikanan

N o.	JENIS INVETASI	KECAMATAN/LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN	NILAI INVESTASI YANG SUDAH ADA	PELUANG POTENSI INVESTASI	KETERANGAN
1	Cold Storage	Koto XI Tarusan	Belum Ada		Penyimpanan ikan	
	IV Jurai	Belum ada	Belum ada			
	Lengayang	DKP	DKP	1.360.450.000		Masih butuh investasi
	Linggo Sari Baganti	Belum Ada	Belum ada			
2	Pabrik Es	Koto XI Tarusan	Belum Ada		Pembekuan ikan/pengawetan ikan	
		IV Jurai	Swasta/Pemda			Masih butuh investasi
		Lengayang	DKP	1.627.482.958		Masih butuh investasi
		Linggo	Belum Ada			

N o.	JENIS INVETASI	KECAMATAN/LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN	NILAI INVESTASI YANG SUDAH ADA	PELUANG POTENSI INVESTASI	KETERANGAN
		Sari Baganti				
3	Travelits	IV Jurai	Belum ada	4.435.239.858	Mengangkat kapan untuk bocking	Masih butuh investasi
		Lengayang	DKP			
4	KIA Kerapu	Mandeh Koto XI Tarusan	Masyarakat	16.860.000.000	Pembibitan Ikan	Masih butuh investasi
		IV Jurai	Masyarakat			Masih butuh investasi
5	KIA Kerapu	Sungai Nyalo	PT Dempo	625.000.000		Masih butuh investasi
6	KIA Kerapu	Sungai Nyalo	PT Andalas Samudera Sejati	.200.000.000		Masih butuh investasi
7	Hetchery	Sungai Nyalo	Sudah ada		Tempat memproduksi benih ikan	Masih butuh investasi
		IV Jurai	DKP			Masih butuh investasi
		Lengayang				Masih butuh investasi

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan

Disamping memproduksi ikan segar masyarakat juga memproduksi ikan kering diantaranya ikan teri dan ikan asin.

4. Bidang Kehutanan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang disutusnya ditutupi oleh hutan dan sisi lainnya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Lebih kurang 74% dari luas wilayahnya merupakan hutan, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Suaka Alam Wisata (HSAW). Hutan TNKS merupakan bagian terbesar, yaitu sebesar 51,01% sedangkan sisanya adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam wisata seperti tabel berikut:

Tabel 2.26
Potensi Investasi Sektor Kehutanan

No.	JENIS HUTAN	LUAS AREA (Ha)	PERSENTASE
	Hutan Lindung		
1	Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW)	295,63	51,01
2	Hutan Lindung (HL)	23,1	3,99
	Kawasan Budidaya		
3	Hutan Produksi	5,3	0,91
4	Hutan Produksi Konservasi HPK)	25,38	4,38
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3174	5,43
	Area Penggunaan Lain		
6	Perairan Darat	1,85	0,32
7	Pemukiman	14,57	2,51
8	Perkebunan	59,15	10,21
9	Pertanian	107,84	18,61
10	Pertambangan	14,95	2,58

Sumber Data: BPS Kab. Pesisir Selatan

5. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa sungai dengan debit air yang cukup deras. Sungai-sungai yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi alternatif. Setidaknya terdapat 16 lokasi yang sumber airnya berasal dari beberapa sungai seperti Batang Sungai Lundang, Batang Bayang, Batang Lumpo, Batang Salido, Batang Kapas, Batang Jalamu, Batang Kayu Gadang, Batang Surantiah, Batang Kambang, Batang Pelangai, Batang Inderapura, dan Batang Tapan. Peluang investasi energi alternatif yang bisa dikembangkan di Pesisir Selatan adalah pembangunan minihidro.

Tabel 2.27
Potensi Pembangkit Listrik Minihidro di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sumber Air	Kecamatan	Potensi Debit Pengambilan
1	Batang Sungai Lundang	Koto XI Tarusan	8 M3/dt
2	Batang Bayang	IV Nagari Bayang Utara	4 M3/dt
3	Batang Bayang	IV Nagari Bayang Utara	10.5 M3/dt
4	Batang Bayang	IV Nagari Bayang Utara	12 M3/dt
5	Batang Bayang	IV Nagari Bayang Utara	10.5 M3/dt
6	Batang Lumpo	IV Jurai	7 M3/dt
7	Batang Salido	IV Jurai	7 M3/dt
8	Batang Kapas	Batang Kapas	7 M3/dt

9	Batang Kapas	Batang Kapas	7.1 M3/dt
10	Batang Jalamu	Batang Kapas	2,74 M3/dt
11	Batang Kayu Gadang	Sutera	6 M3/dt
12	Batang Surantiah	Sutera	12 M3/dt
13	Batang Kanbang	Lengayang	7 M3/dt
14	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	20,77 M3/dt
15	Batang Inderapura	Pancung Soal	8 M3/dt
16	Batang Tapan	Ranah IV Hulu Tapan	11,1 M3/dt

Sumber: Dinas PSDA, 2016

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi peluang investasi. Terdapat 18 (delapan belas) buah sumber daya alam (energi tambang) yang potensial dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya yang memiliki potensi cukup besar sebagai berikut:

Tabel 2.28
Potensi Invetsasi Sumber Daya Alam

No	Jenis Energi Tambang	Kecamatan	Lokasi
1	Andesit	Koto XI Tarusan	Sungai Pinang, Taluak Raya, Nanggalo
		Bayang	Selayang Pandang, Gurun Panjang, Pinang Bairik
		IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang, Muaro Aie
		IV Jurai	Sungai Niapah, Bukit Langkisau Painan Selatan, Koto Salido, Lumpo Barat, Lumpo Selatan
		Batang Kapas	Talauak Kasal Sunagi Bungin, Tuik Kt. Gunung Kp. Baru
		Sutera	Taratak, Ampalu
		Lengayang	Koto Saiyo
		Ranah Pesisir	Pasia Pelangai, Koto VIII
		Linggo Sari Baganti	Padang XI Punggusaran, Pasa Punggasan
		Pancung Soal	Inderapura Utara
2	Batubara	Bayang	Selayang Pandang
		IV Jurai	Ampuan Lumpo Barat, Bukit Pulau Lumpo Selatan, Sungai Nipah
		Batang Kapas	Pasar Kuok, Tuik Kt. Gunung Kp. Baru
		Sutera	Kayu Aro
		Ranah Pesisir	Bukit Punai Gunung Mas
		Pancung Soal	Inderapura Selatan
		Ranah IV Hulu Tapan	Panadah Sungai Gambir
		Basa IV Balai Tapan	Ampang Tulak
		Lunang	Kumbang

No	Jenis Energi Tambang	Kecamatan	Lokasi
3	Granitis	Koto XI Tarusan	Simpang Carocok, Rajo Agam Siguntua, Sungai Lunsang Taratak
		IV Jurai	Gunung Harun Painan Timur, Lumpo Timur
		Batang Kapas	Lubuk Nyiur, Trt. Tampatih Pdg Galundi
		Lenggayang	Koto Pulai
		Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang
		Pancung Soal	Inderapura Selatan
		Ranah IV Hulu Tapan	Koto Pulai, Sungai Gambir
		Basa IV Balai Tapan	Pasa Bukik
		Lunang	Kumbung, Bukit Tapuih
4	Sirtu	Kota XI Tarusan	Batang Tarusan Siguntur, Batang Tarusan Talawi
		Bayang	Batang bayang Apa Jaya
		IV Jurai	Batang Lumpo Limau Gadang, Batang Painan Bungo Pasang
		Batang Kapas	Batang Tuik Kt. Gunung Kp. Baru
		Sutera	Batang Surantih Ampalu
		Lengayang	Batang Kambang Medan Baiak, Batang Lengayang Koto Baru, Batang Lakitan
		Ranah Pesisir	Batang Pelangai Pasia Pelangai
		Linggo Sari Baganti	Batang Air Haji
		Pancung Soal	Batang Inderapura (Inderapura Timur)
		Ranah IV Hulu Tapan	Batang Tapan Kubu, Batang Tapan Sungai Gambir
		Lunang	Batang Lunang Tanjung Beringin
5	Tanah Iliat	Koto XI Tarusan	Mandeh
		Bayang	Puluik-puluik, Asam Kumbang
		IV Jurai	Silayang, Painan Selatan
		Batang Kapas	Teluk Kasai
		Sutera	Taratak
		Lengayang	Kotobaru, Koto Kandih
		Ranah Pesisir	Pasia Pelangai
		Linggo Sari Baganti	Pasa Aia Haji, Pasa Bukik Aia Haji
		Ranah IV Hulu Tapan	Muaro Sako
		Basa IV Balai Tapan	Alang Rambah
		Lunang	Lunang
		Silaut	Silaut

Sumber Data: Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral Kab. Pesisir Selatan

6. Bidang Perdagangan dan Industri

a. Bidang Perdagangan

Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat perkembangan di bidang perdagangan, diantaranya dengan dilakukannya pembangunan pasar tradisional yang representatif. Pasar yang ada sekarang tidak sebanding dengan sarana pasar yang seharusnya dimiliki untuk sarana kegiatan perekonomian yang sangat dibutuhkan. Pembangunan pasar tradisional yang representatif sangat dibutuhkan di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Indikator kedua di bidang perdagangan adalah koperasi, dimana perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena belum mampu bersaing. Koperasi diharapkan mampu untuk masyarakat guna menjual hasil pertanian. Koperasi sangat membutuhkan dana sebagai modal untuk usaha di koperasi.

b. Bidang Perindustrian

Dibidang perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan masih berskala kecil. Dimana industri yang dikelola adalah masih bersifat home industri seperti beberapa usaha yang dapat diandalkan saat ini adalah:

- 1) Sulaman Bayang
- 2) Batik Tanah Liek
- 3) Makanan seperti rakik maco, ikan teri, stik teri.

Industri tersebut masih membutuhkan biaya dan pengembangannya agar kegiatan tersebut lebih maju dan dapat berkembang dengan baik.

7. Bidang Peternakan

Dibidang peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan semakin nyata seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kawasan Agropolitan. Beberapa jenis ternak umum dikembangkan masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.29
Potensi Investasi Sektor Peternakan

No	Jenis Peternakan	Populasi (Ekor)	Produksi (Kg)	Lokasi	Status Kepemilikan	Peluang Investasi
1	Sapi	79.997	1.198.891	15 Kec	Milik Masyarakat	Pengolahan Daging dan Perdagangan Ternak
2	Kerbau	8.319	48.116	15 Kec	Milik Masyarakat	Pengolahan Daging dan Perdagangan Ternak

3	Kambing	44.398	40.193	15 Kec	Milik Masyarakat	Rumah Makan dan Perdagangan Ternak
4	Ayam buras	784.488	841.363	15 Kec	Milik Masyarakat	Rumah Makan dan Perdagangan Ternak
5	Ayam ras	296.079	236.937	15 Kec	Milik Masyarakat	Rumah Makan dan Perdagangan Ternak
6	Ayam petelur	103.843	42.835	15 Kec	Milik Masyarakat	Rumah Makan dan Perdagangan Ternak
7	itik	149.843	61.488	15 Kec	Milik Masyarakat	Rumah Makan dan Perdagangan Ternak

Sumber: Dinas Peternakan

8. Bidang Perhubungan dan Transportasi

a. Pelabuhan

Pelabuhan Kapal Laut Pansahan Painan, Pesisir Selatan cukup strategis. Melalui pelabuhan itu berbagai hasil bumi yang ada di Pesisir Selatan dan daerah tetangga lainnya seperti Muko Muko, Provinsi Bengkulu dan Kerinci, Jambi dapat diangkut melalui pelabuhan tersebut.

Strategis dan berpotensi pelabuhan Panasahan maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap menjadikan pengembangan pelabuhan tersebut dalam skala prioritas pembangunan berkelanjutan, sesuai harapan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten setempat. Serta juga diharapkan adanya investasi yang dapat melakukan pembangunan pelabuhan seperti pembangunan gedung-gedung perkantoran dan tempat bongkar muat barang-barang. Selain Pelabuhan Panasahan terdapat juga beberapa pelabuhan mini yang berpeluang untuk dijadikan potensi investasi yaitu:

- 1) Kecamatan Koto XI Tarusan
- 2) Kecamatan Lengayang
- 3) Kecamatan Linggo Sari Baganti

b. Transportasi

Dibidang transportasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan peluang pada investor untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyediaan angkutan umum yang layak dan representatif, seperti angkutan darat antar kecamatan, antar kabupaten, dan antar propinsi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

3.1. Peningkatan Iklim Penanaman modal

- a) Penciptaan kepastian hukum, perlindungan hukum dan perlakuan yang adil kepada investor.
- b) Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah melalui :
 - 1) Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
 - 2) Penyelenggaraan Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
 - 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
 - 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 5) Peningkatan iklim kondusif ketenagakerjaan dan kepemilikan lahan, keterbukaan informasi bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal.
- c) Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan.
- d) Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar dan pemerintah di lokasi investasi.
- e) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pelayanan penanaman modal yang berdaya saing.

3.2. Mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan potensi kawasan

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

A. Pengembangan berdimensi wilayah

- a. Pengembangan dan penataan PKWp Kota Tapan
 - i. Pengembangan PKWp (Kota Tapan) yang dilakukan melalui kegiatan:

- ii. Pembangunan rumah sakit kelas B.
- iii. Peningkatan pasar regional.
- iv. Pembangunan terminal regional tipe C.
- v. Pembangunan Terminal Barang serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal.
- vi. Pengembangan pelabuhan laut di Air Haji.
- vii. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.
- viii. Pembangunan sistem drainase primer di Kota Tapan.
- ix. Pembangunan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan.
- x. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
- xi. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpusat (IPLT) di Kota Tapan.
- xii. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah kawasan RSH di Kota Tapan
- xiii. Pembangunan prasarana dan sarana SMA/U unggul di Kota Tapan.
- xiv. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan perguruan tinggi di Kota Tapan.
- xv. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman.

b. Pengembangan PKL Kota Painan.

Pengembangan PKL dilakukan melalui kegiatan :

- i. Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas B menjadi A.
- ii. Peningkatan sarana pasar Regional.
- iii. Pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B.
- iv. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal.
- v. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.
- vi. Pembangunan sekolah tinggi di Painan.
- vii. Pembangunan SMA/U unggul.
- viii. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
- ix. Pembangunan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan.

c. Pengembangan PPK Kota Tarusan, Kota Kambang, Kota Inderapura dan Kota Lunang.

Pengembangan PPK dilakukan melalui kegiatan :

- i. Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas C.
- ii. Peningkatan sarana pasar Regional.
- iii. Pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal tipe C.
- Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal.

iv. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.
v. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
Pembangunan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan.

- i. Pengembangan PPL Kota Barung barung Balantai, Pasar Baru, Asam Kumbang, Lumpo, Pasar Kuok, Surantih, Koto Baru, Balai Salasa, Air haji, Muaro Sakai, Sindang dan Lunang.
- ii. Pembangunan Kepariwisata
- iii. Pemekaran Kabupaten, Kecamatan dan Nagari
- iv. Pengembangan akses mitigasi bencana
- v. Penataan kawasan hutan

d. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata meliputi empat wilayah destinasi yaitu, DUPK Carocok dan sekitarnya, DUPK Mandeh dan sekitarnya, DUPK Pasir Putih dan sekitarnya, dan DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya. Masing-masing DUPK dibagi lagi menjadi Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK).

Tabel 3.1.
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

WILAYAH DESTINASI	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK Carocok dan Sekitarnya	Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai	Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera	-
DUPK Mandeh dan Sekitarnya	Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan	Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara	-
DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	Pasir Putih, Kecamatan Lengayang	Kecamatan Ranah Pesisir	Kecamatan Linggosari Baganti
DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya	Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Kecamatan Lunang	Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

B. Kawasan Pengembangan Ekonomi

Kawasan pengembangan ekonomi diarahkan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan produksi (agropolitan, minapolitan, dll) dan kawasan industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi.

- a. Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) direncanakan untuk pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- b. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
- c. Pengembangan Sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- d. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
- e. Kawasan Industri meliputi industri kerajinan dan agroindustri yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah.
- f. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.
- g. Pengembangan Minapolitan di Kawasan Mandeh.

3.3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi:

- 1) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang pangan:
 - 1) Pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal.
 - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan pertanian.
 - 3) Pengembangan pusat informasi agribisnis.
 - 4) Penggunaan teknologi pertanian tepat guna.
- b) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur:
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pertanian.
 - 2) Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat pengembangan ekonomi dan pariwisata.
- a) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang energi:
 - 1) Optimalisasi potensi dan pengembangan energi alternatif serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk kegiatan investasi.

- 2) Pemberian kemudahan/insentif kepada investor untuk investasi pengembangan energi terbarukan.

3.4. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah pada sektor industri, transportasi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economics*);
- d) Pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e) Pengembangan daya saing SDM yang professional dan mampu mengelola penanaman modal yang ramah lingkungan;
- f) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu dan aspek hilir;
- g) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;
- h) Pengembangan dan penyebaran pembangunan investasi yang ramah lingkungan di kawasan-kawasan andalan, startegis, KAPET, KEK dan kawasan potensial lainnya.

3.5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

- a) Strategi naik kelas, yaitu : usaha untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk naik kelas sehingga dapat berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha yang lebih besar; dan
- b) Strategi aliansi strategis: usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengadakan kemitraan (kerjasama) antara dua belah pihak dengan mengutamakan asas saling menguntungkan, kesetaraan dan keterbukaan.

3.6. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah.

a) Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai berikut :

1. efisiensi;
2. efektivitas;
3. transparan;
4. sederhana;
5. berkeadilan;
6. perhitungan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b) Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) berbagai kemudahan pelayanan perijinan melalui Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang Penanaman Modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- 4) fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- 5) fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
- 6) fasilitasi penyediaan energi; dan
- 7) fasilitasi penyediaan lahan.

Insentif penanaman modal yang dapat diberikan kepada penanam modal di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

- c) Kriteria penanaman modal yang mendapat kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Sesuai dengan Masterplan Penanaman Modal, maka penanam modal yang berhak mendapat kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah :
- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - 7) termasuk skala prioritas tinggi;
 - 8) termasuk pembangunan infrastruktur;
 - 9) melakukan alih teknologi;
 - 10) melakukan industri pionir;
 - 11) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - 13) bermitra dengan UMKM atau koperasi; atau
 - 14) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

3.7. Promosi penanaman modal

- a) Pemanfaatan teknologi informasi berupa situs web dan media *online* lainnya.
- b) Penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui :
 - 1) pameran;
 - 2) seminar;
 - 3) temu usaha;
 - 4) *roadshow*;
 - 5) penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - 6) media lainnya.
- c) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kota Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB IV
PETA PANDUAN (ROADMAP)
IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal disusun menjadi 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu :

4.1. Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;

1. Peningkatan kualitas pelayanan rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Pengoptimalan jumlah dan sarana prasarana serta data perizinan dan non perizinan yang akurat dalam mendukung kegiatan penanaman modal.
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan penanaman modal sumber daya aparatur pemerintah daerah.
 - c. Kepastian hukum untuk kegiatan penanaman modal.
 - d. Pengoptimalan dan peningkatan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan pihak ketiga atau stakeholder serta pengoptimalan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
 - e. Penyusunan sistem operasional kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T) secara sistematis, efektif dan tepat waktu.
 - f. Pengembangan sistem pelayanan perijinan *one stop service*.
2. Peningkatan kualitas promosi Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. menyusun dan updating data serta mempromosikan data potensi melalui WEB.
 - b. peningkatan dan kualitas promosi ke daerah lain
 - c. menyempurnakan mekanisme dan prosedur perizinan, monitoring serta evaluasi secara komprehensif.
 - d. pelayanan sarana informasi dan pengaduan perizinan.
 - e. pameran promosi potensi dan peluang investasi dalam negeri.
3. Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan data base potensi investasi dan perizinan.

- b. menyusun data base potensi sumber daya daerah sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (*multi stakeholder*).
4. Peningkatan realisasi investasi Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
- a. melakukan penyempurnaan regulasi penyelenggaraan penanaman modal.
 - b. kerja sama di bidang investasi antar kabupaten/kota updating data potensi investasi yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. penyusunan profil investasi Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Pendataan sumber daya dan sarana prasarana yang dapat menarik investor.
 - e. Upload data sumber daya dan sarana prasarana yang mendukung minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;

Fokus pengembangan pada sektor bangunan/infrastruktur dan energi Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembangunan infrastruktur dan energi.
- b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengimplementasian kebijakan energi nasional.
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi ramah lingkungan di masa mendatang.
- d. difokuskan pada Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) : pembangunan jalan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4.3. Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar;

Penguatan *tradeable* sektor dan UMKM sektor industri berbasis pangan dan jasa. Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. pengembangan industri kecil dan menengah yang memiliki prospek kedepan yang cukup signifikan.

- b. pengoptimalan pertumbuhan ekonomi dengan melihat potensi dan kondisi eksisting terutama pada sektor perdagangan, industri dan jasa.
- c. penyusunan studi kelayakan dan kajian strategis pengembangan industri.
- d. sosialisasi peluang investasi sektor industri.
- e. kerjasama untuk pemasok bahan baku industri.
- f. peningkatan koordinasi pembangunan industri skala besar secara berkesinambungan.
- g. pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan industri.
- h. Pengembangan SDM berdaya saing dan professional yang mampu mengelola industri skala besar.
- i. penyusunan Peraturan Daerah terkait pengembangan UMKM, industri kecil mebel serta jasa.
- j. promosi/pameran hasil kerajinan dan potensi investasi di bidang UMKM.

4.4. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

Fokus pengembangan investasi dengan Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. pengembangan sektor jasa yang memiliki potensi yang cukup signifikan yaitu jenis wisata yang dapat dikembangkan secara intensif yaitu budaya dan religi, wisata kerajinan, wisata alam dan wisata buatan.
- b. penyusunan studi kelayakan di bidang pariwisata.
- c. pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pengembangan pariwisata.
- d. Pengembangan SDM bidang pariwisata yang unggul dan professional.

BAB V PENUTUP

Rencana Umum Penanaman Modal kabupaten Pesisir Selatan memuat tentang arah kebijakan penanaman modal dan roadmap implementasi penanaman modal di kabupaten Pesisir Selatan. Arah kebijakan penanaman modal meliputi Peningkatan Iklim Penanaman modal, Mendorong persebaran penanaman modal yang berdasarkan visi dan misi penanaman modal daerah, Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan, Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, Promosi penanaman modal.

Disisi lain, roadmap pengimplementasian rencana umum penanaman modal dibagi menjadi empat fase yaitu, Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi, Pengembangan Industri Skala Besar, dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan. Masing-masing fase tersebut mempunyai fokus pengembangan yang kemudian dilaksanakan dengan beberapa kegiatan pendukung atau rencana aksi.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI